

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama. 2008.
- Ali, Mohamad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung. Angkasa. 1982.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press. 2009.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo, 2000
- Asyhadie, Zaeny. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Boediono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang. UMM Press. 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. 2006.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Kansil, C.S.T, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Jala Permata Aksara. 2009.
- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung. Alumni. 1983.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Mubarak, Nafi. *Hukum Dagang*. Malang. UIN Press. 2006.
- Narawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung. Agung Media. 2008.
- Saliman, Abdul R., dkk. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*. Jakarta. Kencana. 2005.

- Sesung, Rusdianto, dkk. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya. R.A.De.Rozarie. 2017.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Situmorang, Victor & Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta. Kencana. 2016.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2010.
- Sumiarni, Endang. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta. UAJY Press. 2013.
- Suyatna, Bagong. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Prenada Media. 2005.
- Thong Kie, Tan. *Buku I Studi Notariat Indonesia suatu Penjelasan*. Jakarta. Rajawali Press. 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 1999.
- Untung, Budi. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta. CV. Andi Offset. 2015.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta. Forum Sahabat. 2009.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 1999.

### **Jurnal:**

Maylaksita, Amanda. "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia". *Lex Renaissance*. Volume 4, Nomor 1. Januari. 2019.

Noor, Hendry Julian. "Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 1. Februari. 2016.

Sanjaya, Ryan, "Kajian Terhadap Kepailitan Notaris Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 4, April, 2016.

Wardhana, Aditya Sakti. "Prinsip Keadilan dalam Pembehentian Tidak Dengan Hormat terhadap Notaris Akibat Kepailitan". *Lex Humana*. Volume 2, Nomor 1. Oktober. 2017.

### **Tesis:**

Gozali, Irwan. "Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit". *Tesis*. Program Studi S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Yogyakarta. 2013.

Maulida, Nur Aini. "Pemberhentian Notaris karena Pailit". *Tesis*. Program Studi S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR). Surabaya. 2011.

Sayuna, Inche. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Tesis*. Program Studi S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Surakarta. 2016.

### **Internet:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sinkronisasi", <https://kbbi.web.id/sinkronisasi>, (diakses tanggal 12 Juli 2021).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Notaries Act of 3 April 1999 (Undang-Undang Notaris Belanda).

The Notaries Act, 1952 (Undang-Undang Notaris India Tahun 1952).

Notaries Public Act Chapter 208 Revised Edition 1997 (Undang-Undang Noataris Singapura).

**Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang:**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan UUJN*. Jakarta. 2004.